

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan PDRB, Jumlah Penduduk, Kondisi Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *Dependency Ratio* dan *Sex ratio* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

5.1.1 Perkembangan PDRB Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang mencerminkan akumulasi nilai seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu daerah selama periode tertentu, umumnya satu tahun. Dalam studi ini, diterapkan pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang mencerminkan nilai riil kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Berikut disajikan perkembangan PDRB_{ADHB} di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2024:

Tabel 5. 1 PDRB_{ADHB} di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2010	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Kab. Kerinci	-	18,74	7,43	8,79	9,65	9,80	3,89
Kab. Merangin	-	16,88	13,82	13,72	11,05	13,08	4,90
Kab. Sarolangun	-	12,22	14,76	25,74	3,29	5,55	4,40
Kab. Batanghari	-	13,96	14,74	29,23	4,69	2,76	4,67
Kab. Muaro Jambi	-	16,08	13,03	19,60	8,90	12,77	5,03
Kab. Tanjung Jabung Timur	-	5,36	11,35	17,55	-2,08	8,87	2,93
Kab. Tanjung Jabung Barat	-	9,22	13,32	19,02	1,52	9,61	3,76
Kab. Tebo	-	15,73	15,00	16,22	7,44	12,96	4,81
Kab. Bungo	-	14,65	16,05	24,04	5,48	4,12	4,60
Kota Jambi	-	16,62	8,33	13,38	10,95	8,03	4,09
Kota Sungai Penuh	-	19,16	5,54	8,77	9,18	8,48	3,65
Provinsi Jambi	-	12,62	13,27	19,12	6,08	9,96	4,36

Sumber : BPS, data diolah 2025

Berdasarkan data perkembangan PDRB dari tahun 2010 hingga 2024 di Provinsi Jambi, terlihat adanya tren pertumbuhan yang signifikan di sebagian besar kabupaten/kota. Pada tahun 2020, hampir semua daerah menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan tahun 2010. Kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah Kota Sungai Penuh sebesar 19,16 persen. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami pertumbuhan relatif lebih rendah, yakni 5,36 persen.

Memasuki tahun 2021, sebagian besar wilayah tetap mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, dengan Kabupaten Tebo mencatatkan kenaikan sebesar 15 persen dan Kabupaten Bungo sebesar 16,05 persen. Provinsi Jambi mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,27 persen, menandakan tren positif secara keseluruhan. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB kembali meningkat, dengan daerah seperti Kabupaten Batanghari dan Sarolangun mencatatkan lonjakan pertumbuhan sebesar 29,23 persen dan 25,74 persen. Kabupaten Bungo juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 24,04 persen. Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi secara keseluruhan pada tahun ini mencapai 19,12 persen, menjadikannya tahun dengan perkembangan tertinggi setelah 2020.

Pada tahun 2023, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pertumbuhan yang paling rendah tahun ini, yakni sebesar -2,08 persen. Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi juga melambat menjadi hanya 6,08 persen. Pada tahun 2024, terjadi sedikit pemulihan laju pertumbuhan di beberapa daerah. Kabupaten Tebo dan Muaro Jambi naik yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 12,96 persen dan 12,77 persen. Sementara itu, Kabupaten Batanghari kembali mengalami penurunan pertumbuhan yang hanya sebesar 2,76 persen. Pertumbuhan Provinsi Jambi meningkat menjadi 9,96 persen, menunjukkan adanya perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata perkembangan $PDRB_{ADHB}$ selama periode 2010 hingga 2024, Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan nilai rata-rata perkembangan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi yakni sebesar 5,03 persen. Capaian ini mengindikasikan adanya dinamika ekonomi yang positif dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi tersebut didukung oleh semakin berkembangnya sektor sekunder/tersier. Selain itu, Kabupaten Muaro Jambi juga memiliki basis sektor unggulan seperti industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya, yang turut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan rata-rata perkembangan $PDRB_{ADHB}$ paling rendah dalam periode yang sama, yaitu sebesar

2,93 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut berlangsung relatif lambat. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya nilai sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estat dan sektor jasa lainnya, sehingga membuat rata-rata perkembangan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah jika dibanding daerah lain di Provinsi Jambi seperti yang terlihat pada lampiran 12.

Provinsi Jambi sendiri mencatatkan rata-rata perkembangan sebesar 4,37 persen selama periode 2010–2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, tren umum pertumbuhan PDRB di Provinsi Jambi bersifat positif dan meningkat secara bertahap.

5.1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Jumlah penduduk sering dijadikan tolok ukur untuk menilai dinamika demografi, tingkat pembangunan, dan kondisi ekonomi di suatu daerah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, penduduk memegang peranan ganda: sebagai pengguna produk (*demand*) dan sebagai penghasil barang dan jasa (*supply*). Maka dari itu, lonjakan jumlah penduduk tidak selalu menjadi kendala bagi pembangunan, terlebih jika masyarakatnya memiliki kemampuan yang tinggi dalam menciptakan sekaligus mengonsumsi hasil produksi.

Jumlah penduduk merupakan indikator penting dalam studi demografi dan ekonomi karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kebutuhan akan layanan publik, pendidikan, perumahan, dan lapangan kerja. Ketika Jumlah penduduk tinggi, kebutuhan akan sumber daya juga naik, yang mampu memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan distribusi yang adil dan mencukupi. Smith menjelaskan bahwasanya pertumbuhan penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar tersebut akan meningkatkan tingkat spesialisasi pada perekonomian. Akibatnya, intensitas aktivitas ekonomi nantinya meningkat. Spesialisasi ini akan menekan pertumbuhan ekonomi sebab produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan signifikan dan memicu perkembangan teknologi.

Adapun kategorisasi rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk yaitu; 0-0,05% (sangat rendah), > 0,05 – 0,50% (rendah), > 0,50 – 1,00% (moderat), > 1,00 – 1,50% (tinggi), dan > 1,50% (sangat tinggi).

Berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024 pada tabel 5.2

Tabel 5. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024 (Orang)

Kabupaten/Kota	2010	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Kab. Kerinci	-	0,91	0,64	0,79	0,48	0,62	0,25
Kab. Merangin	-	0,63	0,45	0,53	3,02	1,36	0,43
Kab. Sarolangun	-	1,78	1,24	1,53	1,39	1,41	0,53
Kab. Batanghari	-	2,50	1,66	2,12	-0,15	1,22	0,52
Kab. Muaro Jambi	-	1,72	1,19	1,47	1,45	1,38	0,52
Kab. Tanjung Jabung Timur	-	1,20	0,87	1,04	1,08	0,95	0,37
Kab. Tanjung Jabung Barat	-	1,39	0,98	1,22	1,84	1,39	0,49
Kab. Tebo	-	1,34	0,95	1,14	1,73	1,28	0,46
Kab. Bungo	-	1,95	1,32	1,66	0,83	1,30	0,50
Kota Jambi	-	1,40	0,99	1,21	1,32	1,17	0,43
Kota Sungai Penuh	-	1,74	1,24	1,43	0,57	1,08	0,43
Provinsi Jambi	-	1,47	1,04	1,28	1,32	1,23	0,45

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2025

Pada Tabel 5.2 dapat dilihat bahwasanya sepanjang tahun 2010 hingga 2024 terjadi dinamika perkembangan jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Tahun 2010 hingga 2020 daerah yang mempunyai perkembangan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kabupaten Batanghari sebesar 2,50 persen dan daerah dengan perkembangan jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Merangin sebesar 0,63 persen.

Pada Tahun 2021, Kabupaten dengan perkembangan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Batanghari sebesar 1,66 persen, sedangkan perkembangan terendah terjadi di Kabupaten Merangin yakni 0,47 persen. Pada Tahun 2022, peningkatan jumlah penduduk lebih merata terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota. Kabupaten yang memiliki perkembangan tertinggi yaitu Kabupaten Batanghari yakni 2,12 persen dan Kabupaten dengan perkembangan terendah yaitu Kabupaten Merangin yakni 0,53 persen. Tahun 2023, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Merangin mengalami peningkatan yakni 3,02 persen

dan menjadi daerah dengan perkembangan tertinggi pada tahun tersebut, sementara itu Kabupaten Batanghari memiliki perkembangan terendah yakni -0,15 persen. Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun menjadi daerah yang memiliki perkembangan jumlah penduduk tertinggi yaitu 1,41 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Kerinci yakni 0,62 persen.

Secara rata-rata, perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jambi selama periode 2010 hingga 2024 sebesar 0,45 persen, ini termasuk dalam kategori sangat rendah. Kabupaten Sarolangun tercatat memiliki rata-rata perkembangan jumlah penduduk tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi yakni 0,53 persen, akan tetapi angka ini masih termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh, tingkat fertilitas yang tinggi seperti yang terlihat pada lampiran 5.

Sebaliknya, Kabupaten Kerinci menunjukkan rata-rata perkembangan jumlah penduduk terendah selama periode yang sama yaitu sebesar 0,25 persen. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tingginya angka migrasi keluar, seperti yang terlihat pada lampiran 5.

5.1.3 Kondisi Tenaga Kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024

Kelompok usia kerja mencakup mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan terlibat pada aktivitas ekonomi, baik sedang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sedang cuti, ataupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Mereka yang bekerja termasuk bagian dari angkatan kerja yang secara langsung berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, baik melalui pekerjaan tetap, sementara, paruh waktu, atau kontrak. Informasi lebih lanjut terkait kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dapat ditemukan pada Tabel 5.3.

**Tabel 5. 3 Tenaga Kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2010-2024 (Persen)**

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-rata
	2010	2020	2021	2022	2023	2024	
Kab. Kerinci	95,42	97,57	97,68	97,37	97,52	97,49	97,18
Kab. Merangin	92,62	95,14	95,17	95,31	95,65	95,82	94,95
Kab. Sarolangun	95,89	94,29	94,48	94,78	94,91	94,97	94,89
Kab. Batanghari	95,45	95,58	95,74	96,47	96,15	95,51	95,82
Kab. Muaro Jambi	93,24	94,57	94,41	96,65	94,60	94,73	94,70
Kab. Tanjung Jabung Timur	97,02	98,59	98,44	98,68	98,33	97,94	98,17
Kab. Tanjung Jabung Barat	96,75	97,84	97,47	97,12	97,05	96,80	97,17
Kab. Tebo	95,20	97,05	97,17	98,62	98,29	97,50	97,31
Kab. Bungo	97,00	94,06	94,14	94,50	94,77	95,33	94,97
Kota Jambi	92,18	89,51	89,34	91,05	91,73	92,62	91,07
Kota Sungai Penuh	86,73	94,44	97,00	97,51	96,20	95,70	94,60
Provinsi Jambi	94,61	94,87	94,91	95,41	95,47	95,52	95,13

Sumber : BPS, data diolah 2025

Tabel 5.3, memperlihatkan bahwasanya persentase tenaga kerja yang bekerja Kabupaten/Kota Provinsi Jambi cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fenomena ini diduga karena perubahan jumlah penduduk usia produktif, yang berdampak pada jumlah tenaga kerja yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun tersebut. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan turut mendukung peningkatan tingkat produksi.

Pada tahun 2020 hingga 2021, terjadi pandemi COVID-19 yang berakibat pada banyak pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK, sehingga menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Dampak ini tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja, seperti yang terlihat di beberapa Kabupaten/Kota seperti di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Namun ditahun setelahnya, jumlah tenaga kerja bekerja kembali mengalami peningkatan di Kabupaten/Kota tersebut. Perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha dan menyalurkan bantuan kepada penduduk yang terkena PHK. Hingga pada tahun 2024 jumlah penduduk yang bekerja kembali mengalami peningkatan secara keseluruhan sebagai dampak dari adanya perbaikan perekonomian.

Kabupaten/Kota dengan rata-rata persentase tenaga kerja yang tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang didukung oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Sedangkan, Kota Jambi mempunyai rata-rata tenaga kerja terendah di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka migrasi penduduk ke Kota Jambi, yang meningkatkan jumlah penduduk di daerah tersebut. Bertambahnya jumlah penduduk ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat pengangguran, yang disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan.

5.1.4 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan sumber daya manusia, yang mencakup angka harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Dengan demikian, IPM memiliki peran penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Data mengenai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024 dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5. 4 IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-rata
	2010	2020	2021	2022	2023	2024	
Kab. Kerinci	65,16	72,47	72,72	73,24	73,77	74,33	71,95
Kab. Merangin	63,85	70,2	70,55	70,98	71,81	72,65	70,01
Kab. Sarolangun	64,64	71,63	72,02	72,66	73,05	73,76	71,29
Kab. Batanghari	65,67	71,34	71,61	71,99	72,5	73,12	71,04
Kab. Muaro Jambi	62,84	70,41	70,79	71,41	72,26	73,11	70,14
Kab. Tanjung Jabung Timur	57,21	67,58	68,09	68,96	69,85	70,77	67,08
Kab. Tanjung Jabung Barat	61,49	69,62	70,26	70,88	71,44	72,01	69,28
Kab. Tebo	63,62	70,51	70,73	71,14	71,99	72,67	70,11
Kab. Bungo	66,28	72,46	72,7	73,08	73,57	74,44	72,09
Kota Jambi	72,23	79,19	79,94	80,38	80,93	81,77	79,07
Kota Sungai Penuh	69,96	76,02	76,3	76,75	77,2	77,93	75,69
Provinsi Jambi	65,39	72,29	72,62	73,11	73,73	74,36	71,92

Sumber : BPS, data diolah 2025

Tabel 5.4 menunjukkan bahwasanya IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi cenderung berfluktuasi setiap tahunnya dan termasuk kedalam kategori sedang dan tinggi. Pada data terlihat rata-rata IPM tertinggi terdapat di Kota Jambi

dengan persentase mencapai 79,07. Hal tersebut diakibatkan oleh tingginya pertumbuhan pendidikan, angka harapan hidup, serta kualitas kehidupan yang layak, ditambah dengan letak geografis yang strategis, yaitu berada di pusat Provinsi Jambi, sehingga pembangunan manusia menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan tingkat rata-rata IPM terendah, yaitu senilai 67,08. Faktor penyebabnya adalah rendahnya angka harapan hidup dan kurangnya perhatian terhadap daerah-daerah terpencil yang mana di daerah tersebut masih kesulitan akses untuk mendapatkan pendidikan.

Peningkatan terus terjadi karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengupayakan agar kualitas penduduk terus mengalami peningkatan seperti dibukanya pelatihan-pelatihan yang meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai bidangnya, mewajibkan sekolah 12 tahun dengan berbagai beasiswa sekolah yang membantu penduduk kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, adanya program bantuan kesehatan untuk penduduk kurang mampu dan sebagainya.

Berbagai upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bekal utama agar penduduk dapat lebih produktif. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pada tingkat IPM di beberapa Kabupaten, hal ini karena adanya pembatasan aktivitas skala besar banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan membuat banyak anak putus sekolah guna membantu meringankan beban orang tua yang kesulitan karena pandemi COVID-19. Angka IPM tahun 2021 mulai mengalami perbaikan. IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan IPM di Provinsi Jambi terus dilakukan hingga tahun 2024 setiap Kabupaten/Kota mencapai tingkat tertinggi IPMnya dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.5 Kondisi *Dependency Ratio* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Besarnya persentase *dependency ratio* (rasio ketergantungan) memperlihatkan semakin tingginya beban yang perlu ditanggung penduduk usia produktif pada penduduk usia non produktif, begitu pula sebaliknya. Adapun angka ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024 dapat diamati pada Tabel 5.1.4

Tabel 5. 5 *Dependency Ratio* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-rata
	2010	2020	2021	2022	2023	2024	
Kab. Kerinci	49,79	44,00	44,39	44,88	45,40	45,91	45,73
Kab. Merangin	52,48	45,90	44,48	44,41	44,37	44,36	46,00
Kab. Sarolangun	55,62	48,80	48,36	48,71	49,05	49,38	49,99
Kab. Batanghari	51,25	44,80	44,44	44,48	44,55	44,64	45,69
Kab. Muaro Jambi	49,19	43,10	42,21	42,29	42,41	42,56	43,63
Kab. Tanjung Jabung Timur	50,67	44,80	46,57	46,70	46,85	47,00	47,10
Kab. Tanjung Jabung Barat	53,02	46,40	45,89	45,75	45,68	45,69	47,07
Kab. Tebo	52,86	46,50	45,94	46,21	46,49	46,77	47,46
Kab. Bungo	53,62	47,10	45,58	45,39	45,24	45,12	47,01
Kota Jambi	44,71	39,40	41,89	41,90	41,95	42,04	41,98
Kota Sungai Penuh	52,11	45,90	45,69	45,74	45,79	45,87	46,85
Provinsi Jambi	50,73	44,6	44,61	44,68	44,78	44,91	45,72

Sumber: BPS, data diolah 2025

Tabel 5.5 terlihat bahwa angka *Dependency ratio* (rasio ketergantungan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010 terus menurun hingga tahun 2024, dengan rata-rata sebesar 45,72. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya dari setiap 100 orang, terdapat 45 hingga 46 orang yang menjadi beban tanggungan. Angka ketergantungan tertinggi terdapat di Kabupaten Sarolangun, yaitu sebesar 49,99, yang berarti bahwasanya setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 49 hingga 50 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Peningkatan jumlah penduduk tidak produktif ini dapat diakibatkan oleh tingginya angka kelahiran.

Sementara itu, angka ketergantungan di Kota Jambi tercatat sebesar 41,98, yang menunjukkan bahwasanya setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 41 hingga 42 penduduk tidak produktif. Dari perspektif demografi, kondisi ini

sangat menguntungkan karena beban ketergantungan yang ditanggung oleh penduduk di Kota Jambi tergolong rendah. Data dari *Long Form* Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Kota Jambi mengalami arus migrasi masuk yang cukup signifikan karena sebagai ibu kota provinsi dan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pemerintahan. Dengan demikian, migrasi masuk yang didominasi oleh penduduk usia produktif membantu menurunkan angka *dependency ratio*, karena jumlah penduduk yang bekerja lebih tinggi daripada yang ditanggung.

Menurunnya atau terkendalinya angka ketergantungan di beberapa wilayah di Provinsi Jambi dapat dipengaruhi oleh adanya perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini tergambar dari peningkatan rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang melek huruf dan berpendidikan. Keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) juga berperan penting dalam menurunkan angka kelahiran, yang berdampak pada penurunan angka ketergantungan. Penurunan angka kelahiran ini mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk usia 0–14 tahun, sehingga mengurangi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Kesadaran pasangan usia subur (PUS) menjalankan program KB telah berhasil mencegah dan menurunkan angka kelahiran. Kesadaran menjalankan program keluarga berencana dapat diukur dengan CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) atau proporsi pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB. Semakin banyak pasangan usia subur (15-49 tahun) yang menggunakan alat/cara KB, diyakini sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi angka kelahiran yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap *dependency ratio*.

5.1.6 Kondisi *Sex Ratio* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Sex ratio atau rasio jenis kelamin adalah ukuran yang mencerminkan persentase perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi serta produktivitas individu dalam dunia kerja. Meskipun secara umum tenaga kerja tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki kerap menunjukkan produktivitas lebih tinggi pada pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik. Oleh

karena itu, pemahaman terhadap rasio jenis kelamin menjadi krusial dalam merancang strategi pembangunan yang berspektif gender, yang ditujukan menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Data mengenai angka *sex ratio* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat diamati pada tabel 5.6.

Tabel 5. 6 *Sex Ratio* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Tahun 2010-2024

Wilayah	Tahun						Rata-rata
	2010	2020	2021	2022	2023	2024	
Kab. Kerinci	99,68	100,8	100,7	100,5	100,7	100,6	100,5
Kab. Merangin	105,56	103,8	103,7	103,5	103,1	102,9	103,8
Kab. Sarolangun	104,44	104,6	104,4	104,2	103,9	103,7	104,2
Kab. Batanghari	104,83	105,1	104,9	104,7	104,2	103,9	104,6
Kab. Muaro Jambi	107,55	106,7	106,5	106,4	105,8	105,5	106,4
Kab. Tanjung Jabung Timur	105,45	104,3	104,2	104,0	103,9	103,7	104,3
Kab. Tanjung Jabung Barat	108,07	106,7	106,6	106,4	106,1	105,8	106,6
Kab. Tebo	106,99	105,9	105,8	105,6	105,3	105,1	105,8
Kab. Bungo	105,26	104,1	103,9	103,7	103,7	103,5	104,0
Kota Jambi	101,65	101,5	101,4	101,2	101,3	101,2	101,4
Kota Sungai Penuh	98,48	100,4	100,3	100,1	101	101,2	100,2
Provinsi Jambi	104,63	104,1	104	103,8	103,6	103,4	103,9

Sumber: BPS, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 5.6, bahwa *sex ratio* di Provinsi Jambi dari tahun 2010 hingga 2024, terlihat adanya variasi komposisi penduduk laki-laki dan perempuan antar kabupaten/kota. Kabupaten dengan *sex ratio* tertinggi yakni Kabupaten Muaro Jambi, dengan rata-rata *sex ratio* 106,4 selama periode tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa, jumlah penduduk laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibanding perempuan, bahkan melebihi rata-rata provinsi yang berada di kisaran 103,4. Sebaliknya, wilayah dengan *sex ratio* terendah tercatat di Kota Sungai Penuh, dengan nilai rata-rata berturut-turut sekitar 100,2. Ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk di daerah tersebut cenderung lebih seimbang atau sedikit didominasi oleh perempuan, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 6.

Sementara itu, rata-rata nilai *sex ratio* Provinsi Jambi selama periode pengamatan yaitu 103,9. Adapun daerah yang memiliki nilai *sex ratio* mendekati rata-rata Provinsi Jambi yakni Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo, dengan nilai rata-rata *sex ratio* antara 103,5 hingga 103,8. Kondisi

ini mencerminkan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif stabil di ketiga kabupaten tersebut.

Secara keseluruhan, pola sebaran *sex ratio* di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berada dalam kisaran normal (sekitar 100–105), dengan beberapa daerah menonjol secara khusus baik karena dominasi laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini dapat dijadikan pertimbangan pada perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah.

5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Dependency Ratio, dan Sex ratio Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024

Pada bagian ini, penelitian akan mengukur dan menjelaskan sejauh mana variabel jumlah penduduk, tenaga kerja, *dependency ratio*, dan *sex ratio* memengaruhi PDRB baik secara simultan, maupun parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Analisis akan menggunakan model regresi berganda dengan data panel.

5.2.1 Pemilihan Model Pengujian Data Panel Terbaik

Dalam memilih model terbaik pada alat analisis data panel maka terdapat 3 tahapan pengujian yang dijalankan mencakup Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) seperti berikut :

1. Uji Chow

Uji chow (*chow test*) ialah metode yang di gunakan untuk menentukan model terbaik antara *common effect* atau *fixed effect*. Penentuan ini dijalankan melalui membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Hipotesis yang diangkat untuk Uji Chow diantaranya :

- a) $\text{Prob} > 0,05$, maka model yang terbaik yaitu CEM
- b) $\text{Prob} < 0,05$, maka model yang terbaik yaitu FEM

Tabel 5. 7 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: KAB_KOTA
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	51.022774	(10,50)	0.0000
Cross-section Chi-square	159.477144	10	0.0000

Sumber : Data diolah, Eviews 12 (2025)

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa baik F_{test} maupun *Chi-Square* menunjukkan nilai probabilitas yang signifikan, yaitu 0,0000 yang di bawah alpha 0,05. Oleh karena itu, model yang paling tepat yakni *fixed Effect model* (FEM).

2. Uji Hausman

Uji hausman dilaksanakan guna membandingkan *fixed effect model* dengan *random effect model* dalam rangka memilih model terbaik yang dipilih untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang diangkat pada Uji Hausman yaitu :

- Bilamana $\text{Prob} > 0,05$, maka model yang terbaik yaitu *Random effect model* (REM)
- Bilamana $\text{Prob} < 0,05$, maka model yang terbaik yaitu *Fixed effcet model* (FEM).

Tabel 5. 8 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: KAB_KOTA
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.559887	5	0.0000

Sumber : Data diolah, Eviews 12 (2025)

Pada hasil tabel 5.8 menunjukkan nilai probability *cross-section random* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *fixed*.

Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, maka untuk menilai uji regresi data panel menggunakan model *fixed* dalam menentukan Keputusan hasil penelitian ini.

5.2.2 Uji Asumsi Klasik

Pada pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS), pengujian autokorelasi tidak dibutuhkan karena masalah ini umumnya hanya muncul pada data deret waktu. Selain itu, uji linearitas hampir tidak diterapkan secara rutin dalam setiap model regresi linier sebab model tersebut sudah diasumsikan bersifat linier. Basuki dan Prawoto (2015) menjelaskan bahwasanya tidak semua uji asumsi klasik harus dilaksanakan dalam segala bentuk regresi linear berbasis OLS. Pada model yang dipilih, yakni *Fixed Effect Model* pengujian asumsi klasik dilakukan selektif, mengikuti karakteristik data panel yang digunakan. Berikut ialah hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bermaksud guna mengidentifikasi adanya hubungan linier yang tinggi di antara variabel bebas pada model regresi. Suatu model dianggap mengalami multikolinearitas bilamana nilai koefisien korelasi antar variabel independen melebihi ambang batas dari 0,85. Kriteria penilaian Uji Multikolonieritas :

- Variabel $X < 0,8$, maka terbebas dari masalah Multikolonieritas.
- Variabel $X > 0,8$ maka data terdapat masalah Multikolonieritas

Tabel 5. 9 Hasil Uji Multikolinearitas

	JP	TK	IPM	DR	SR
JP	1	-0.468144	0.355342	-0.510715	0.175001
TK	-0.468144	1	-0.311968	0.144933	0.315431
IPM	0.355342	-0.311968	1	-0.706541	-0.540402
DR	-0.510715	0.144933	-0.706541	1	0.184835
SR	0.175001	0.315431	-0.540402	0.184835	1

Sumber : Data diolah, *Eviews* 12 (2025)

Melalui tabel 5.9, koefisien antar variabel meunjukkan nilai dibawah 0,85. Hal tersebut searah dengan kriteria uji multikolinearitas, yang menetapkan bahwasanya tidak boleh terdapat koefisien korelasi antar variabel independen yang

melampaui 0,85. Maka, dapat berkesimpulan bahwasanya model tersebut tidak ditemui masalah multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dijalankan guna menentukan apakah dijumpai ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji Glejser ditetapkan dalam pengambilan keputusan. Kriteria penilaian Heteroskedastisitas dengan uji glejser :

- Bilamana Prob > 0,05 maka lolos uji heteroskedastisitas
- Bilamana Prob < 0,05 maka tidak lolos uji heteroskedastisitas

Tabel 5. 10 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1362.985	2000.701	0.681254	0.4989
JP	-0.000375	0.000991	-0.377872	0.7071
TK	11.69676	7.542067	1.550869	0.1272
IPM	-4.907850	7.663318	-0.640434	0.5248
DR	-8.514905	7.265674	-1.171936	0.2468
SR	-14.67534	17.78532	-0.825138	0.4132

Sumber : Data diolah, *Eviews 12* (2025)

Melalui hasil pengujian yang tercantum dalam tabel 5.10, terlihat bahwasanya nilai probabilitas untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,05. Menurut kriteria pengujian, hal tersebut mengindikasikan bahwasanya tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas yang signifikan di antara variabel-variabel tersebut.

5.2.3 Analisis Regresi Data Panel

a. Model Analisis

Signifikansi variabel bebas pada variabel terikat diuji melalui uji hipotesis. Pada hal ini, karena melalui model FEM, maka pengujian hipotesis dilandaskan pada estimasi yang dihasilkan oleh model FEM tersebut. Menurut pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72158.06	80279.85	0.898831	0.3731
JP?	0.220004	0.039771	5.531775	0.0000
TK?	549.0907	302.6319	1.814385	0.0756
IPM?	761.6210	307.4972	2.476838	0.0167
DR?	456.4144	291.5414	1.565522	0.1238
SR?	-2405.492	713.6511	-3.370683	0.0015
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI--C	-3396.597			
_MERANGIN--C	-9769.062			
_SAROLANGUN--C	2534.735			
_BATANGHARI--C	5896.837			
_MUAROJAMBI--C	-1197.156			
_TANJABTIM--C	23476.00			
_TANJABBAR--C	29317.97			
_TEBO--C	-3516.844			
_BUNGO--C	-9271.912			
_KOTAJAMBI--C	-58371.30			
_KOTASUNGAIPENUH--C	24297.33			

Sumber : Data diolah, *Eviews* 12 (2025)

Melalui hasil regresi pada tabel 5.12 diatas maka dihasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 72158.06 + 0.220004JP + 549.0907TK + 761.6210IPM + 456.4144DR - 2405.492SR$$

Dari persamaan tersebut maka diinterpretasikan bahwa:

- 1) Konstanta senilai 72158.06. Artinya adalah apabila variabel jumlah penduduk, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, *dependency ratio* dan *sex ratio* dianggap konstan, maka PDRB adalah sebesar Rp72158.06.
- 2) Koefisien regresi jumlah penduduk senilai 0.220004, yang berarti bahwa jika jumlah penduduk bertambah 1 jiwa, maka nilai PDRB akan meningkat sebesar Rp0.220004.
- 3) Koefisien regresi tenaga kerja adalah 549.0907, yang mengindikasikan bahwa apabila tenaga kerja bertambah 1 persen, maka nilai PDRB akan meningkat sebesar Rp549.0907.

- 4) Koefisien regresi indeks pembangunan manusia senilai 761.6210, yang menandakan apabila IPM meningkat 1 persen, maka nilai PDRB akan meningkat sebesar Rp761.6210.
- 5) Koefisien regresi *dependency ratio* sebesar 456.4144, yang artinya jika *dependency ratio* meningkat 1 persen, maka nilai PDRB akan naik senilai Rp456.4144.
- 6) Koefisien regresi *sex ratio* sebesar -2405.492, yang artinya jika *sex ratio* meningkat 1 persen, maka nilai PDRB akan berkurang sebesar Rp2405.492.

b. Uji F (F_{test})

Berdasarkan hasil regresi data panel diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan memengaruhi variabel dependent ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Nilai Prob (F-statistic) $0,000000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama faktor-faktor jumlah penduduk, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, *dependency ratio* dan *sex ratio* berpengaruh terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024.

c. Uji t (t_{test})

Uji-t digunakan untuk membandingkan pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) (Ghozali, 2016). Hasil analisis regresi data panel pada Tabel 5.11 menunjukkan bahwa faktor jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($P < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024.

Pada faktor tenaga kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0756. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024. Selanjutnya faktor IPM diperoleh nilai signifikansi sebesar

0,0167. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($P < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024.

Faktor *dependency ratio* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1238 lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa *dependency ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024. Selanjutnya faktor *sex ratio* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0015. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($P < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa *sex ratio* berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024.

d. Koefisien Determinasi R^2

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini sebesar 0,963076 yang artinya sebesar 96% PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, *dependency ratio* dan *sex ratio*. Sedangkan sebesar 4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi dari hasil penelitian ini besar karena terdapat 3 faktor yang memengaruhi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

5.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub-bab berikut ini akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian yang sudah di olah menggunakan *software eviws* 12.

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari hasil analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa variabel jumlah penduduk secara statistik berpengaruh terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2024. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa, keberadaan penduduk dalam jumlah besar dapat berdampak nyata terhadap peningkatan output ekonomi daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya daya beli masyarakat, tingkat pendapatan yang merata, serta pola

konsumsi yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar dan sektor informal, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif besar.

Menurut model Solow-Swan, peningkatan jumlah penduduk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada jangka pendek, peningkatan populasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, hal tersebut bisa berdampak negatif terhadap PDRB per kapita, kecuali jika diimbangi dengan peningkatan konsumsi dan produktivitas. Adam Smith juga menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang searah dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian serupa yang menurut (Widiyanto & Arianti, 2022) dan Raskina & Saharuddin, (2023), dimana pada penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya ditemukan pengaruh jumlah penduduk pada produk domestik regional bruto.

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa tidak ada pengaruh variabel tenaga kerja pada PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2024. Hal ini bertolak belakang dengan asumsi dasar teori ekonomi klasik yang menganggap tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama dalam menekan pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, kuantitas tenaga kerja yang besar belum tentu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan output ekonomi suatu daerah, terutama jika tenaga kerja tersebut belum diimbangi dengan kualitas dan produktivitas yang memadai. Fenomena ini sejalan dengan konsep *law of diminishing marginal returns*, yang menyatakan bahwa jika faktor produksi (seperti tenaga kerja) ditambah terus-menerus sementara faktor produksi lainnya tetap, maka tambahan output per unit akan semakin berkurang, bahkan bisa stagnan atau menurun.

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subjek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh

dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan, dengan kata lain, pekerjaan yang memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan membutuhkan pasar dalam negeri.

Hal ini searah dengan riset oleh Muhammad et al., (2021), dan Budihardjo et al., (2020) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwasanya tenaga kerja terhadap PDRB tidak berpengaruh.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Melalui hasil analisis data, dihasilkan nilai signifikansi untuk variabel IPM senilai 0,0000, yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024. IPM sendiri merupakan indikator yang mencerminkan tingkat perkembangan manusia, meliputi harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, IPM menjadi variabel esensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional negara maupun daerah. Hal ini sejalan dengan kerangka teori neoklasik Solow, menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dipicu oleh satu atau lebih dari tiga faktor yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Kondisi menunjukkan bahwa tingginya angka harapan hidup akan berpotensi untuk menambah tenaga kerja untuk dipekerjakan di sektor-sektor ekonomi. hal ini terlihat pada peningkatan indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan PDRB di Provinsi Jambi.

Temuan ini diperkuat dengan riset oleh Simangunsong, (2024) dan Asmoro et al., (2022) yang juga menemukan bahwasanya IPM memiliki pengaruh dan signifikan terhadap PDRB, artinya jika IPM meningkat maka akan meningkat pula PDRB.

4. Pengaruh *Dependency Ratio* Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hasil analisis regresi data panel memperlihatkan bahwasanya *dependency ratio* tidak berpengaruh terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024. *Dependency ratio* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah tergolong wilayah maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara makro, dapat dimaknai bahwa semakin besar *dependency ratio* cenderung semakin menguras daya tahan ekonomi daerah maupun keluarga. *Dependency ratio* tidak berpengaruh terhadap PDRB karena sebagian besar pendapatan penduduk produktif digunakan untuk menanggung konsumsi penduduk yang tidak produktif, sehingga proporsi pendapatan yang dapat dialokasikan untuk tabungan atau investasi menjadi semakin terbatas. Selain itu, kebutuhan penduduk baik pangan, papan dan sandang yang terus mengalami peningkatan harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan membuat penduduk yang memiliki beban tanggungan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil studi yang dijalankan oleh Burhanuddin *et al.*, (2020) dan Putri, (2021). Adapaun hasil penelitiannya yaitu *dependency ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB.

5. Pengaruh *Sex Ratio* Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan bahwa variabel *sex ratio* berdampak pada PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin memiliki kontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Perbandingan

jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat mencerminkan struktur tenaga kerja serta sektor-sektor ekonomi yang dominan di wilayah tersebut.

Hasil ini sejalan dengan temuan oleh Firdausi, (2020) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa *sex ratio* berdampak signifikan dan memiliki hubungan negatif pada PDRB.

5.2.5 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan. Peningkatan jumlah penduduk dapat menekan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen utama pada pembentukan PDRB dari sisi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula potensi konsumsi terhadap barang dan jasa, baik untuk kebutuhan dasar misalnya pangan, sandang, dan papan maupun untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan transportasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga agar pertumbuhan konsumsi tetap terjaga dan dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Selain itu, jumlah tenaga kerja menunjukkan bahwasanya keberadaan tenaga kerja tersebut belum memberikan kontribusi ekonomi yang bermakna. Kondisi ini dapat menandakan bahwas penyerapan tenaga kerja belum disertai dengan peningkatan produktivitas atau keterlibatan di sektor-sektor ekonomi bernilai tambah tinggi. Artinya, walaupun banyak penduduk yang bekerja, pekerjaan tersebut didominasi oleh sektor informal, pertanian subsisten, atau pekerjaan dengan kontribusi rendah terhadap output ekonomi daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, harus diikuti dengan penambahan jumlah lapangan kerja, karena dengan demikian dapat bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam pekerjaan tersebut. Untuk penyelidikan lapangan kerja dan lapangan usaha dibutuhkan sejumlah anggaran baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan bertambahnya jumlah investasi yang masuk ke Provinsi Jambi dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun akan mendukung penyelidikan jumlah lapangan kerja dan lapangan usaha, dan ini akan dapat

membantu mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Berkurangnya jumlah pengangguran dan diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk perlu diadakan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh penduduk dengan kebutuhan pasar kerja. Pada saat ini banyak pekerjaan yang dibutuhkan oleh pasar kerja khususnya berkaitan dengan pekerjaan yang menggunakan teknologi sosial media. Banyak penduduk yang belum sepenuhnya mengerti penggunaan teknologi, termasuk media digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penduduk dibidang teknologi agar dapat memaksimalkan produktivitasnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penurunan tingkat *dependency ratio* merupakan indikasi yang positif, karena semakin rendah rasio tersebut, semakin sedikit beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, diharapkan tingkat produktivitas juga akan meningkat, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan kondisi yang sebaliknya, dimana peningkatan harga kebutuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, untuk membantu mensejahterakan perlu adanya bantuan seperti subsidi terutama untuk bahan pangan penduduk, hal tersebut tentu akan membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Jika kebutuhan terpenuhi maka tingkat kesejahteraannya juga akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bantuan pemerintah untuk penduduk lansia harus terus dilanjutkan dan diharapkan lebih tepat sasaran karena masih banyak penduduk yang sudah melewati usia produktif namun masih harus terus bekerja. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan mampu mengurangi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia tidak produktif.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran ekonomi lainnya. Kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata